

# UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI KOMUNIKASI PERSUASIF DI KOTA SAMARINDA

Ivana Noviariza<sup>1</sup>, Sugandi<sup>2</sup>, Sarwo Wdy Wibowo<sup>3</sup>

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif di Kota Samarinda dan untuk menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Komunikasi Persuasif di Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif di Kota Samarinda dari indikator komunikasi verbal dikatakan sudah maksimal. Satpol PP menggunakan Plang dan Spanduk yang berisi, himbauan kepada masyarakat dilarang memberikan uang kepada pengemis dan gelandang, diberlakukan sanksi kurungan penjara dan denda. Komunikasi nonverbal bagi gepeng yang sudah menerima beberapa kali teguran, maka akan langsung di tangkap bawa ke kantor. Faktor penghambat Kdari kekurangan dana operasional yang digunakan guna operasional Satpol PP, kurangnya unit kendaraan operasional, tersebarnya informasi ke publik, adanya oknum masyarakat yang mengkoordinir para pengemis, lemahnya sistem pengawasan terhadap masyarakat yang menjadi koordinator pengemis, terbatasnya sarana dan prasarana di Samarinda untuk menampung pengemis. Faktor pendukung dari aAdanya dukungan dari pemerintah Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, adanya payung hukum, adanya hak dan kebutuhan anggota Satpol PP, serta dukungan pejabat terkait dalam memberikan semangat penuh kepada Satpol PP dalam menegakkan Perda di Kota Samarinda.*

**Kata Kunci :** *Upaya, Gelandangan, Pengemis, Komunikasi Persuasif*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: ivananoviariza@gmail.com

## **Pendahuluan**

Perubahan struktur organisasi selanjutnya disebut perangkat daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat merupakan titik anjak penelitian ini. Penelitian ini merupakan indikator yang baik bagi peningkatan kinerja perangkat Daerah sebagai ujung tombak pemberian keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan Kota Samarinda.

Semua masalah keamanan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab aparat keamanan tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Tidak menutup kemungkinan warga masyarakat yang berpikiran sempit memanfaatkan era perubahan saat ini untuk kepentingan pribadi, karena peran keamanan khususnya Satpol PP sudah baik tetapi hal tersebut hendaknya perlu lebih ditingkatkan dan tentunya dengan berbagai teknik. Perpaduan yang sangat tangguh dalam mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Peran Satpol PP dalam komunikasi persuasif untuk penertiban dan menanggulangi dalam gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda sangat penting ditinjau untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Samarinda, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman tanpa harus ada yang dirugikan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menggunakan komunikasi persuasif sebagai salah satu upaya komunikasi yang dianggap efektif melalui tatap muka langsung "*face to face*" kepada gelandangan dan pengemis yang kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kurang pengertian terhadap penyampaian pesan sangat kecil jika dibandingkan dengan menggunakan surat edaran ataupun selebaran pemerintah Kota Samarinda. Karena pemahaman mereka yang berbeda-beda, dan juga terkendala oleh pendidikan yang minim yang membuat mereka kurang mengerti dan memahami sehingga petugas Satpol PP dianggap bersikap anarkis dan menimbulkan kesan yang tidak baik (negatif) serta terjadi perdebatan, pemberontakan, antara pihak para gelandangan dan pengemis dan Satpol PP didalam menjalankan tugas-tugasnya seperti melakukan penertiban para gelandangan dan pengemis.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai pedoman tugas kerja salah satunya dalam Penertiban gelandangan dan pengemis. Berdasarkan UU Nomor 32 Pasal 148 dan 149 Tahun 2004 diamanatkan bahwa Satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Maraknya gelandangan di suatu wilayah menimbulkan ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaktertiban serta mengurangi ketidaknyamanan masyarakat disekitarnya. Kebijakan yang dibuat itu harus bisa di implementasikan dan di evaluasi oleh para pelaksana kebijakan dan diharapkan

dapat mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk menertibkan gelandangan dan pengemis dengan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas, dan pengawasan serta penindakan oleh Satpol-PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar dalam penanganan sesuai dengan prosedur atau peraturan daerah yang sudah ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan pengemis melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Upaya***

Upaya menurut Partanto (2008:63), yaitu sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Sedangkan menurut Harianto (2006:631) upaya adalah usaha sadar atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud, akal atau ikhtiar.

Sebagaimana status dari Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan lembaga teknis Pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta bertugas membantu Kepala Daerah, maka untuk mewujudkan ketertiban yang diakibatkan oleh banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Samarinda pemerintah Kota memberikan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk bertindak menertibkan gelandangan dan pengemis tersebut.

Jadi dalam penelitian ini mencari tahu upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Komunikasi Persuasif di Kota Samarinda.

### ***Satuan Polisi Pamong Praja***

Menurut Surianigrat (2004:20), Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah umum atau pemerintah pusat.

Selain itu juga, pengertian satuan polisi pamong praja berdasarkan UU Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan standar operasional prosedur Satpol PP meliputi:

1. Standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah.
2. Standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Standar operasional prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.
4. Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat atau orang-orang penting.
5. Standar operasional prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting.
6. Standar operasional prosedur pelaksanaan operasional patrol.

Syarat yang harus dimiliki oleh petugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum:

1. Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa baik dan benar.
3. Berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggungjawab.
4. Sanggup menerima saran dan kritik dari masyarakat.
5. Memiliki suri tauladan yang dapat dicontoh oleh aparat pemerintah daerah.

Sebagai penyelenggara pemerintah daerah dan penegakkan Peraturan Daerah aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berwenang dalam melakukan tindakan:

- a. Melakukan tindakan non yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas perda/peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau perda/peraturan kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda. Jadi, Satuan Polisi Pamong Praja secara nyata dan jelas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap peraturan daerah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Samarinda dan bertanggung jawab kepada WaliKota Samarinda karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan bagian/kantor dilingkungan Kota Samarinda, dengan kata lain Satpol PP Kota Samarinda merupakan petugas Walikota yang ikut menjalankan beberapa tugas walikota.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan pedaga kaki lima yang ada di jalan-jalan protokol supaya tidak terjadi kemacetan di jalan-jalan tersebut para gelandangan dan pengemis di pindahkan ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, supaya ketertiban umum terbantu atau terlaksana dengan baik.

### ***Pengertian Komunikasi***

Komunikasi pada hakikatnya adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Menurut Effendy (2007:28), pesan

komunikasi terdiri dari dua aspek, *pertama*: isi pesan dan *kedua*: lambang. Tujuan dari komunikasi itu sendiri yaitu, mengubah sikap, mengubah opini, mengubah perilaku, dan mengubah masyarakat. Dalam perkembangannya, komunikasi juga memiliki fungsi tersendiri yaitu: menginformasikan, mendidik, menghibur dan untuk mempengaruhi.

Menurut pendapat Effendy (2007:13), komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.

Menurut Cangara (2009:31), komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses atas suatu pertukaran suatu pesan atau informasi kepada seseorang atau pada masyarakat.

Dasar komunikasi menurut Cangara (2009:31), terbagi 2 yaitu :

#### 1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dapat dimengerti kedua belah pihak, memiliki struktur teratur dan terorganisir dengan baik.

Bentuk komunikasi verbal dalam organisasi adalah:

- a. Berbicara dan menulis
- b. Mendengar dan membaca

Komunikasi Verbal mencakup aspek-aspek berupa ;

- a. *Vocabulary* (perbendaharaan kata-kata).
- b. *Racing* (kecepatan).
- c. *Intonasi* suara.
- d. *Humor*:
- e. Singkat dan jelas.
- f. *Timing* (waktu yang tepat).

#### 2. Komunikasi Nonverbal

Dilakukan secara bahasa isyarat atau menggunakan gerak-gerik badan yang menunjukkan sikap tertentu, umumnya kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, melipat tangan, mengangkat bahu dan sebagainya.

Bentuk komunikasi nonverbal adalah:

- a. Bahasa isyarat.
- b. Ekspresi wajah.
- c. Sandi.
- d. Simbol-simbol.

- e. Pakaian seragam.
- f. Warna.
- g. Intonasi suara.

Komunikasi nonverbal juga penting diketahui terutama dalam kaitannya dengan penyampaian perasaan dan emosi seseorang.

Tujuan komunikasi nonverbal adalah:

- a. Memberikan informasi.
- b. Mengatur alur percakapan.
- c. Mengekspresikan emosi.
- d. Memberi sifat, melengkapi, menentang atau melambangkan pesan-pesan verbal.
- e. Mengendalikan atau mempengaruhi seseorang.
- f. Mempermudah tugas-tugas khusus.

Yang termasuk komunikasi nonverbal:

- a. Ekspresi wajah.
- b. Kontak mata.
- c. Sentuhan.
- d. Postur tubuh dan gaya berjalan.
- e. Sound (Suara).
- f. Gerak isyarat.

Beberapa faktor penghambat dalam komunikasi adalah:

- a. Masalah dalam pengembangan pesan
- b. Masalah dalam menyampaikan pesan
- c. Masalah dalam menerima pesan
- d. Masalah dalam menafsirkan pesan

Dalam komunikasi kadang kala terjadi kesalahpahaman, berikut ini adalah hambatan dalam komunikasi, yaitu:

1. Hambatan dari Proses Komunikasi
  - a. Hambatan dari pengirim pesan.
  - b. Hambatan dalam penyandian/symbol.
  - c. Hambatan media.
  - d. Hambatan dalam bahasa sandi.
  - e. Hambatan dari penerima pesan.
  - f. Hambatan dalam memberikan umpan balik (*feedback*).
2. Hambatan Fisik
3. Hambatan Semantik.
4. Hambatan Psikologis

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman yang terjadi adalah hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantic atau kata-kata yang dipergunakan dalam komunikasi kadang mempunyai arti mendua yang berbeda, tidak jelas atau berbelit-belit

dan hambatan psikologis pada perbedaan nilai-nilai serta harapan yang berbeda antara pengirim dan penerima pesan.

### ***Komunikasi Persuasif***

Menurut Kenneth E. Anderson (dalam Effendy, 2007:30), menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi antar individu. Komunikasi tersebut terjadi di mana komunikator menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya, komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens.

Sedangkan menurut Erwin P. Betinghaus (dalam Effendy, 2007:30), dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran dan perbuatan seseorang, hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar dimana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan.

Lain halnya dalam buku yang ‘Komunikasi Antarmanusia’ yang dijelaskan oleh De Vito (dalam Effendy, 2007:30). De Vito menyatakan bahwa komunikasi persuasif merupakan komunikasi bertujuan untuk menengahkan pembicaraan yang sifatnya memperkuat. Kemudian, memberikan ilustrasi dan menyodorkan informasi kepada khalayak. Akan tetapi, tujuan pokoknya adalah menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku, sehingga penggunaan fakta, pendapat dan himbuan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Dari penjelasan tersebut, De Vito mengemukakan terdapat dua macam tujuan atau tindakan yang ingin dicapai dalam melakukan komunikasi persuasif. Tujuan tersebut dapat berupa untuk mengubah sikap atau perilaku receiver atau untuk memotivasi perilaku receiver.

Komunikasi persuasif akan dapat terbentuk dengan baik, jika terdapat unsur-unsur seperti yang akan dipaparkan di sini. Aristoteles (dalam Effendy, 2007:31) pernah berpendapat bahwa komunikasi itu dibangun oleh tiga unsur yang fundamental (persuader/komunikator). Tiga unsur tersebut bersifat sebagai sumber komunikasi, materi pembicaraan yang dihasilkannya (pesan), dan orang yang mendengarkannya (komunikan). Persuader merupakan orang atau individu yang menyampaikan pesan di mana pesan tersebut memberikan pengaruh sikap, pendapat, hingga perilaku orang lain secara verbal maupun nonverbal.

Segala sesuatu, pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Tujuan inilah nantinya yang digunakan sebagai target suatu kegiatan. Sehingga terbentuklah perencanaan untuk menuju tujuan tersebut. Sebenarnya, komunikasi persuasif ini merupakan bentuk teknik dalam berkomunikasi. Sehingga, tujuan adanya komunikasi persuasif menurut Effendy (2007:32) ini di antaranya:

- a. Perubahan sikap (*attitude change*).
- b. Perubahan pendapat (*opinion change*).
- c. Perubahan perilaku (*behavior change*).
- d. Perubahan sosial (*sosial change*).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya komunikasi persuasif akan menimbulkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku dan perubahan social.

### ***Teori Komunikasi***

Teori komunikasi ialah teori yang digunakan untuk menerangkan, menjelaskan, menilai untuk memahami fenomena komunikasi. Satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat.

### ***Teori Lasswell***

Teori komunikasi yang dianggap paling awal (1948). Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan: *Who says in which channel to whom with what effect* (Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa).

Menurut Lasswell semua komunikasi bersifat dua arah, dengan aliran informasi yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima. Dalam suatu masyarakat yang kompleks, pada umumnya informasi difilter oleh pengendali pesan seperti editor, penyensor, atau propagandis yang menerima informasi dan menyampaikannya kepada khalayak dengan beberapa penambahan dan pengurangan.

### ***Gelandangan dan Pengemis***

Gelandangan adalah seseorang yang hidup mengelandangan dan sekaligus mengemis. Sedangkan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain, sedangkan menurut Huda (2009:29), pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandangan. istilah gelandangan artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.

Menurut Suud (2008:8), gelandangan dan pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandangan dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandangan dan mengemis karena malas dalam bekerja. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak



mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo. Praktek ini mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.

### ***Definisi Konsepsional***

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui Komunikasi Persuasif di Kota Samarinda adalah usaha Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Satpol PP sebagai komunikator, memberikan pesan, melalui saluran kepada gelandangan dan pengemis sebagai penerima pesan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

#### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif di Kota Samarinda dilihat dari segi:
  - a. Komunikasi Verbal.
  - b. Komunikasi Nonverbal.
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif di Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Sumber data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informasi Kunci) nya yaitu Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- b. Informan yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Pegawai sebagai pemberi informasi.
- c. Informan lainnya yaitu 1 orang gelandangan dan 4 orang pengemis yang tertangkap di kantor Satuan Polisi Pamong Praja

## 2. Sumber Data Sekunder

Untuk menunjang penelitian ini diambil dari data-data yang berupa dokumen-dokumen yang berasal dari data yang dimiliki di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

### ***Tehnik Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya peneliti langsung mengadakan penelitian lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
  - a. *Observasi*: yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang diperlukan.
  - b. Penelitian dokumen (*document research*) yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### ***Tehnik Analisis Data***

Menganalisa data kualitatif terdiri dari 4 komponen, antara lain :

1. Pengumpulan data.
2. *Data Reduction* atau penyederhanaan data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan. (Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman serta Johnny Saldana, 2014:14).

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

#### ***Gambaran Umum Tempat Penelitian***

##### ***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda***

Sebagai Penegak Peraturan Daerah dan lembaga teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat khususnya pengemis, dan juga dalam melaksanakan program kegiatan Satpol PP yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, kepatuhan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, maka tindakan dipolakan dalam tahapan-tahapan, yakni tindakan pre-emptif yang terdiri dari pemberian penerangan, himbauan, dan pendekatan persuasif, apabila tindakan ini sudah dilakukan dan masih ditemukan pelanggaran maka pola tindakan berikutnya adalah dengan pola prefentif yang dilakukan baik dengan patroli, pengawasan, penjagaan/ penghalauan, pemeriksaan setempat, dan dengan teguran lisan/ tertulis. Apabila pola tindakan yang kedua telah dijalankan dan masih ditemukan pelanggaran yang sama oleh masyarakat khususnya pengemis, maka tindakan yang terakhir adalah dengan pola tindakan refresif

yaitu dengan Non Yustisi, artinya dengan melakukan pembongkaran barang dagangan maupun dengan pemindahan barang dagangan. Selain itu, juga dengan tindakan Yustisi yaitu melalui sidang pengadilan.

### **Visi Misi**

#### **Visi**

Sesuai dengan tugas pokok dan wewenang yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, serta dengan melihat latar belakang serta isu-isu yang berkembang, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah: **“Samarinda Yang Nyaman, Aman, Tertib, Sehat, Bersih Dan Indah”**.

#### **Misi**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Mewujudkan ketaatan masyarakat yang telah diberikan kesempatan berusaha, agar secara sadar memiliki kepedulian untuk menciptakan Kota Samarinda menjadi **“SAMARINDA YANG NYAMAN, AMAN, TERTIB, SEHAT, BERSIH DAN INDAH”**.
3. Meningkatkan pembinaan terhadap PSK, Gepeng dan Anjal.
4. Meningkatkan pembinaan pengemis dan Asongan.
5. Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Misi tersebut mengandung arti agar para PKL dan asongan dapat mematuhi ketentuan yang ada. Untuk mematuhi ketentuan yang ada maka perlu adanya pembinaan.

### **Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda.**

#### ***Komunikasi Verbal.***

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Komunikasi Verbal Satuan Polisi Pamong Praja berupa himbuan kepada masyarakat melalui Plang dan Spanduk larangan memberikan uang kepada pengemis dan gelandang. Diberlakukan lah sanksi kurungan penjara dan denda. Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan efek jera kepada pengemis dan gelandang, dengan menangkap dan dibawa di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Dapat dikatakan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, upaya Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan maksimal.

Dalam penegakan Peraturan Daerah kota Samarinda, pihak yang terlibat selain Satuan Polisi Pamong Praja. Juga dari instansi Dinas Sosial sesuai dengan instruksi pimpinan. Komunikasi verbal dalam penyampaian pesan, Satuan Polisi Pamong Praja lebih banyak menggunakan pesan himbauan kepada masyarakat. Penertiban yang Satuan Polisi Pamong Praja lakukan, secara rutin dilakukan setiap hari. Dengan adanya komunikasi verbal, maka membuat pekerjaan tersebut berjalan dengan baik dalam melakukan penertiban dan penanggulangan pengemis.

Melalui pesan yang diberikan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai komunikator, dan sesuai dengan teori Kenneth E. Anderson (dalam Effendy, 2007:28), menyatakan komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja antar individu dengan pengemis dan gelandangan. Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan simbol-simbol untuk mempengaruhi pikiran si penerima sebagai dengan sendirinya, komunikator dapat merubah tingkah laku dan perbuatan audiens yang pertamanya himbauan yang Satuan Polisi Pamong Praja lakukan kepada masyarakat. Maka gelandangan dan pengemis akan merasakan dari perbedaan tanggapan masyarakat kepada mereka, berbeda dikarenakan adanya peraturan dan himbauan yang dilakukan instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi lain Dinas Sosial yang melaksanakan upaya penertiban dan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan secara maksimal.

Dengan dikenakan sanksi administrasi bagi pengemis dan gelandangan dengan surat pernyataan perjanjian, maka pengemis dan gelandangan tidak akan mengulangi kegiatannya kembali. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Daerah dalam menuntaskan masalah pengemis dan gelandangan dengan melakukannya razia secara rutin. Karena di Kota Samarinda gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak lagi berada dijalanan umum maupun persimpangan jalan untuk melakukan aktivitas mengemis atau dengan cara apapun untuk mendapat belas kasihan dari orang lain.

Karena tidak dapat mencari pekerjaan, pengemis yang pendidikannya rendah dan tidak mempunyai keahlian. Maka dengan menjadi pengemis, mereka berfikir mudah mendapatkan uang. Karena tidak bisa membaca dan menulis, pengemis tidak mengetahui adanya larangan atau peraturan tentang larangan untuk mengemis dari pemerintah.

### ***Komunikasi Nonverbal.***

Penyampaian pesan yang berupa larangan bagi gelandangan dan pengemis dengan komunikasi nonverbal tadi dari isyarat, bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dilakukan agar ketentraman masyarakat menjadi terkendali dengan adanya gelandang dan pengemis. Bagi pengemis yang melanggar peraturan, maka akan langsung di bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Minimal pengemis sudah mengerti akan peraturan pemerintah.

Komunikasi nonverbal Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyampaikan pesannya sudah jelas sampai dipahami oleh gelandangan dan pengemis. Supaya gelandangan dan pengemis mengerti apa yang Satuan Polisi Pamong Praja lakukan. Kami lakukan ditempat para pengemis berada dan melanggar peraturan. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan arahan dan di usahakan agar semuanya mengerti. Satuan Polisi Pamong Praja bisa di akomodir dengan baik sehingga menimbulkan hasil yang baik kepada pengemis.

***Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Melalui Komunikasi Persuasif Di Kota Samarinda.***

a. Faktor penghambat.

Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menjalankan upaya menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif di Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja terkendala dari batas waktu. tidak lepas dari kendala atau hambatan, seperti kekurangan dalam hal dana operasional yang digunakan, kurangnya unit kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penertiban di lapangan, kendala lainnya yang dihadapi kemudian yaitu sering bocornya informasi ke publik yang di sebabkan oleh oknum dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu sendiri serta adanya oknum masyarakat yang mengkoordinir pengemis demi keuntungan pribadi, lemahnya sistem pengawasan terhadap koordinator pengemis sehingga para koordinator tersebut dapat keluar masuk di Kota Samarinda, dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menampung khusus pengemis.

b. Faktor pendukung.

Faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja, tidak lain dari adanya dukungan dari Pemerintah Samarinda dalam mengatasi adanya gelandangan dan pengemis. Walikota Samarinda setiap hari menghubungi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dianggap sebagai dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya payung hukum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, di tambah lagi dengan adanya hak dan kebutuhan anggota yang selalu dipenuhi dengan baik, seperti gaji bulanan yang selalu diterima tepat pada waktunya.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan pengemis di Kota Samarinda meliputi:

a. Komunikasi Verbal

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis melalui komunikasi persuasif, dari komunikasi verbal dikatakan sudah maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan Plang dan Spanduk yang berisi, himbauan kepada masyarakat dilarang memberikan uang kepada pengemis dan gelandang, diberlakukan sanksi kurungan penjara dan denda. Satuan Polisi Pamong Praja mengupayakan efek jera kepada pengemis dan gelandang. Yang dibantu dari instansi Dinas Sosial. Pengemis tidak dapat mencari pekerjaan, karena mempunyai pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai keahlian. Maka dengan menjadi pengemis, mereka berfikir mudah mendapatkan uang. Pengemis tidak mengetahui adanya larangan atau peraturan tentang larangan untuk mengemis dari pemerintah, dikarenakan tidak bisa membaca dan menulis.

b. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal bagi gepeng yang sudah menerima beberapa kali teguran, maka akan langsung di tangkap bawa ke kantor. Cara penyampiannya dilakukan secara bertahap. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia gelandangan dan pengemis, dengan strategi beberapa orang anggota ditugaskan duluan menggunakan baju preman/biasa melakukan pemantauan dilokasi biasa lokasi gelandangan dan pengemis berada, meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis yang tersebar di kawasan setempat, pimpinan memberikan berita kepada anggota, bahwa razia yang akan dilakukan akan di tunda. Dengan tersebarnya berita tersebut, maka berita razia tidak akan diketahui oleh masyarakat dan koordinator gelandang dan pengemis. Selain menggunakan mobil Dinas, beberapa orang anggota juga menggunakan motor dengan pakaian Dinas dan pakaian biasa.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung

a. Faktor penghambat.

Kekurangan dana operasional yang digunakan guna operasional Satpol PP, kurangnya unit kendaraan operasional yang digunakan untuk Razia melakukan kegiatan-kegiatan penertiban pengemis dilapangan, tersebarnya informasi ke publik, jika akan ada jadwal razia Satpol PP, yang disebabkan dari oknum internal anggota Satpol PP, adanya oknum masyarakat yang mengkoordinir pengemis yang dimanfaatkan sebagai keuntungan pribadi, lemahnya sistem pengawasan terhadap masyarakat yang menjadi koordinator pengemis, terbatasnya sarana dan prasarana di Samarinda untuk menampung pengemis.

b. Faktor pendukung.

Adanya dukungan dari pemerintah Samarinda dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, adanya payung hukum Peraturan Daerah

Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda, adanya hak dan kebutuhan anggota yang selalu dipenuhi dengan baik, seperti gaji dan dukungan moril dari Walikota Samarinda, serta para pejabat terkait yang selalu memberikan semangat penuh kepada Satpol PP di dalam menegakkan Perda di Kota Samarinda.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja, menindaklanjuti mengenai kekurangan dana operasional yang dibutuhkan, terbatasnya sarana prasarana untuk menertibkan pengemis.
2. Kepala Satpol PP, melaporkan kekurangan unit kendaraan operasional yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penertiban pengemis dilapangan.
3. Adanya hukuman berat bagi masyarakat yang mengkoordinir pengemis dan bagi masyarakat yang menghalangi Satpol PP dalam penertiban pengemis.

### **Daftar Pustaka**

- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Partanto, Pius A. dan Dahlan M. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Surianigrat. B. 2008. *Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suud, Muhammad. 2008. *Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Presatsi Pustaka.

### **Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.